

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abidin. *Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Adriani. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba 4, 2014.
- Apeldoorn, L.J Van. *Pengantar Ilmu Hukum, Terj. Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1993.
- Askin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang prinsi-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Granfindo, 2016.
- Brotodiharjo, R. Santaso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Reika Aditama, 2003. dkk, Said Sampara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total media, 2011.
- Edi, Supriyanto. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2014.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Faruq, M. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPAMPYKPN, 2001.
- . *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMMPK YPKN, 2001.
- . *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Harefa, Mandala. *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Hartati, Neneng. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Husen, La Ode. *Negara Hukum Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan, Edisi Revisi*. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2019.

- Husodo, Siswo Yudo. *Mimpi negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa, 2006.
- Juhaya, H. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Kota Bandung: Bina Cipta, 1975.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.
- Mariot Pahala, Siahaan,. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. . Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Mariot, Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Marsyahrul, Tony. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter M. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mustafa, Bachsan. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1982.
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1970.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Granit, 2005.
- Pohan, Chairil Anwar. *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2021.
- Prakosa, Bambang Kesit. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Sobirin Malia, 2003.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Ratnawati. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laslbang Pressindo, 2010.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Dan Teori Kasus 4*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2008.
- Rochmat, Soemitro. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pendapatan 1944*. Bandung: PT. Eresco, 1998.

- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctkn Ke-dua*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Saragih, Moh Kursnadi dan Bintan. *Edisi Revisi, Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media, 2000.
- Sari, Diana. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soestrino, Ph. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 1982.
- Suandy. *Erly Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Suparmo. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Supriyanto, Edy. *Akutansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Suseno, Frans Magnis. *13 Model Pendekatan Etika: Bunga Rampai Teks-teks Etika dari Plato Sampai Dengan Niezche*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia, Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

B. Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Cara Pemeriksaan Pajak

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 125/SK.1046/HUK/82 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

C. Sumber lain

Abbon, Thomas.(2019), "Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Pakal Di Indonesia." Volume 5, No. 1, April 2019.

Dewim, I., & Laksmi, K. (2019), Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmiah Akutansi dan Bisnis, Volume 4, No. 1, Juni 2019 ISSN: 2528-2093 (print), ISSN: 2528-1216 (online) Volume 4, No. 1, Juni 2019 <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi>.

Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

Fitri Wahyuni, "*Problematika Penerapan Pajak Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor di Wilayah Bandung Berdasarkan PERDA No 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*" No 2 Volume 2 Oktober 2019, Hlm92,

Hukum, Universitas Kristen Indonesia, 2019. <https://ayopajak.com/pajak-progresif-adalah/> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021, 17:37 WIB.

Machfud, Sidik, Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Makalah, Yogyakarta, 2002.

Riki Handayani, Riris Sitorus, Pengaruh Intensifikasi Pajak Kendaraan Dan Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Pemoderasi, Media

Manajemen Jasa, ISSN 2502-362, Vol.6, No 1 Januari-Juni 2018,
www.journal.uta45jakarta.ac.id

Siswanto,P, San Jati, A. 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali

Sumantry, Deden “ Reformasih Perpajakan Sebagai Perlindungan Hukum Yang Seimbang Antara Wajib Pajak Dengan Fiskus Sebagai Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Perpajakan, Jurnal Legiaslasi Indonesia Vol. 8, No 1 hlm

Tri Setiady, Implikasi Utang Pajak Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Wajib Pajak, Fiat Justisia Jurnal Hukum Volume 0 No 2 April-Juni 2015 ISSN 1978-5186, file:///C:/Users/user/Downloads/593-Article%20Text-1891-2-10-20160526.pdf

Desentralisasi Fiskal, Materi ini disampaikan dalam Seminar Nasional:

<https://opendata.jabarprov.go.id/id/visualisasi/jumlah-kendaraan-bermotor-provinsi-jawa-barat>, diakses pada tanggal 4 Februari 2022, 19:41 WIB

<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-pendapatan-pajak-daerah-berdasarkan-jenisnya-di-jawa-barat>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022, 16:22 WIB

<https://bogorkab.go.id/post/detail/kegiatan-intensifikasi-pajak-kendaraan-bermotor-melalui-penelusuran-ktmdu-tahun-2019>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022, 13:57 WIB